

PENGARUH POLICE POPULATION RATIO (PPR) TERHADAP KONDISI DAN RASA AMAN DI MASYARAKAT

PENDAHULUAN

Umum

- a. Beberapa dekade yang lalu diyakini oleh para pakar dan praktisi kepolisian di berbagai belahan dunia bahwa PPR merupakan jawaban yang tepat untuk memberikan rasa aman di dalam masyarakat; dan bahkan puluhan negara berkembang sampai saat ini masih menggunakan PPR sebagai *adagium* untuk memberikan kepuasan kepada masyarakatnya tentang pelayanan kepolisian.
- b. Dengan semakin mengedepan teori tentang Community Policing, maka strategi penambahan petugas Polisi dengan patokan angka PPR semakin lama semakin meragukan, karena hipotesa "penambahan jumlah Polisi akan senantiasa memberikan rasa aman masyarakat" masih perlu dibuktikan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini juga mengingat adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan rasa aman di dalam masyarakat.
- c. Dalam konteks itulah maka perlu adanya penelitian yang membuktikan hipotesa tentang fenomena dan variabel yang akan mengakibatkan bertambahnya rasa aman masyarakat.

Penelitian dilakukan di Polda-Polda yang PPR nya mendekati ideal dan Polda-Polda lain yang PPR nya rendah untuk kemudian di lakukan perbandingan.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini di susun dengan maksud untuk menggambarkan hasil-hasil penelitian tentang Signifikansi Police Population Ratio Dengan Kondisi Dan Rasa Aman Di Masyarakat.

b. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan agar pimpinan dan pejabat teras mendapatkan bahan-bahan masukan untuk dapat dijadikan pedoman strategi dalam menciptakan rasa aman masyarakat.

Pengertian pengertian

Police Population Ratio (PPR) :

PPR merupakan perbandingan antara jumlah Polisi yang dibutuhkan dengan jumlah penduduk yang diawasi. PPR adalah satu pendekatan untuk menghitung jumlah Polisi yang dibutuhkan secara ideal suatu negara berdasarkan "beban tugas" seorang anggota Polisi untuk mengawasi sejumlah penduduk tertentu.

Model Tradisional ini telah berkembang sejak tahun 1829 dengan dituliskannya pedoman tugas, *London Metropolitan Police* yang dipelopori Sir Robert Peel dan dikembangkan lebih lanjut oleh O.W. WILSON hingga tahun 1970. Dalam model ini perhitungan kuantitas polisi selalu dikaitkan dengan patroli polisi yang mempunyai kegiatan memenuhi panggilan bantuan, inisiatif petugas patroli, patroli preventif dan kegiatan administratif (Edward. Thibault : 1998).

Ratio Anggota Polri dengan penduduk sudah jauh di bawah ratio yang disarankan PBB 1: 400, sehingga membuat Polri menjadi terkecil di dunia (sekarang 1:2000 secara nasional). Di daerah-daerah masih banyak Polres dengan ratio 1:3000, (bahkan ada yang 1:5.000) keadaan ini sudah tidak memungkinkan Polri di lapangan bertugas seperti dahulu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan pembagian 3 ploeg sehari yaitu 3x8 jam (ditambah lagi dengan relatif rendahnya kemampuan teknis profesional dan sarana, telah mengakibatkan sukarnya bagi Polri untuk melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat). Kepolisian di dunia selalu memperhitungkan *Police Population Ratio*. Indonesia sekarang 1:1200, sedangkan India yang penduduknya 1 milyar memiliki 1:700, Pakistan 1:600, Malaysia, Singapura, Jepang, rasionya dibawah 1:400. (Anton Tabah : 2001).

Rasa Aman Masyarakat.

Menurut Doktrin Keamanan Rakyat Semesta istilah "aman" meliputi 3

pengertian :

- a) Aman sebagai sesuatu yang ideal adalah keadaan di mana ada tata tenteram kerta raharja. Dalam pengertian ini aman adalah identik dengan tujuan bangsa, ialah terciptanya masyarakat adil dan makmur.
- b) Aman adalah suatu keadaan, dimana segenap masyarakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan gangguan atau ancaman, sehingga memungkinkan masyarakat tersebut mencapai tujuan nasionalnya.
- c) Keamanan adalah suatu kondisi yang memungkinkan tiap warga di dalam masyarakat Indonesia, melakukan segala kegiatan kehidupannya, sehingga menuju kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan pancasila.

Pengertian keamanan masyarakat menurut Kamus Istilah Polri adalah suasana yang menciptakan (pada individu, manusia dan masyarakat) perasaan - perasaan sebagai berikut :

- a) Perasaan bebas dari gangguan, baik fisik maupun psikis (Security)
- b) Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekawatiran, keragu-raguan dan ketakutan (Surety)
- c) Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya (Safety)
- d) Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batiniah (Peace)

Pengertian rasa aman masyarakat juga dapat di temui dalam falsafah Tata

Tenteram Kerta Raharja (TTKR). Rasa aman (tenteram) timbul sebagai akibat dari keadaan yang tertib dan tenteram yakni kondisi masyarakat yang semua mentaat semua aturan, norma dan kaidah yang berlaku, baik kaidah hukum sosial, adat maupun agama. Didalam pengertian ini rasa aman masyarakat juga bersifat dinamis dalam arti dapat mendorong masyarakat untuk sibuk bekerja (kerta) dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur (raharja).

Ada beberapa teori untuk mewujudkan rasa aman didalam masyarakat, dimana salah satunya adalah teori O.W Wilson yang menerapkan prinsip "Polisi selaku penegak hukum harus ada di mana-mana, menunggu laporan penduduk untuk dilakukan tindakan Kepolisian". Teori yang berkembang sampai pertengahan tahun 1970 ini melahirkan strategi "mencetak" anggota Polisi hingga mencapai target jumlah tertentu, sebanding dengan masyarakat yang harus diawasinya (target ideal perbandingan jumlah anggota Polisi dengan penduduk dari PBB adalah 1:400). Salah satu butir hasil penelitian David H. Bayley menyimpulkan bahwa penambahan jumlah Polisi tidak selalu menurunkan jumlah kejahatan dan menumbuhkan rasa aman di masyarakat.

Sebenarnya target Police Population Ratio (PPR) sangat berat untuk dicapai karena anggaran yang harus dialokasikan untuk menciptakan keadaan aman memang sangat mahal. Ternyata keterbatasan ini membuat manusia menciptakan paradigma baru yang lebih

pro aktif yakni Community Policing yang dipelopori oleh G.L. Killing, James Q. Wilson dan Herman Goldstein. Teori yang berkembang sejak tahun 1970 ini mengandalkan orientasi dan pendekatan dari aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengamankan dirinya, menjadisa dan taat hukum serta siap menolak segala bentuk kejahatan. Dengan demikian masalah peningkatan jumlah Polisi tidak dikaitkan dengan jumlah penduduk yang diawasi akan tetapi berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memerlukan "Kemitraan dengan Polisi".

Pendekatan terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia (A.Maslow) tetapi perlu lebih bersifat komprehensif yakni juga berdasarkan sendi-sendi kehidupan beragama, karena pada hakekatnya rasa takut dan was-was pada diri manusia memang diberikan oleh Tuhan agar manusia segera mendekatkan diri, minta perlindungan kepadaNYA, agar merasa aman /tenteram. (Quran - Al Baqarah, dan lain-lain, Injil Roma 13 : 1-4 dan Bagawadwita ayat 12). Jadi upaya Community Policing terarah pada dua aspek yaitu aspek kebutuhan dasar dan aspek spiritual / keagamaan.

Meskipun penambahan personil polisi tidak selalu menurunkan crime total, namun penambahan jumlah personil dalam kaitan kebutuhan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang di hadapi masyarakat tetap diperlukan (tapi

tidak terkait dengan target PPR). Oleh karenanya hipotesa disusun secara eksplisit seperti di bawah ini .

Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan tehnik analisa kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut :

a. Analisa Reliabilitas dan Validitas

Yaitu untuk melihat tingkat reliabilitas dan validitas variabel guna mendukung teori dalam penentuan alat ukur rasa aman didalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Diskripsi data hasil angket.

Variabel A. Rasa aman masyarakat

Pertanyaan no 1 tentang perasaan masyarakat bila disekitarnya ada anggota Polri. Dari 736 responden yang dimintai pendapatnya ternyata 533 responden atau sebesar 72,32 prosen beranggapan bahwa mereka merasa terlindungi dan yang beranggapan tidak merasa apa-apa sebesar 153 responden atau 20,76 %.

PERTANYAAN NO 1

Skala	Polda					Total (%)	Total (%)
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	1	0	0	5	15	21	2.85 (%)
b/2	1	3	1	7	18	30	4.07 (%)
c/3	35	39	17	26	36	153	20.76 (%)
d/4	152	151	80	70	80	533	72.32 (%)
S	189	193	98	108	14	737	100.00 (%)

b. Analisa Korelasi

Yaitu untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang diasumsikan sebagai variabel depend-ent dengan variabel independent.

c. Analisa kecenderungan

Yaitu untuk melihat kearah mana kecenderungan dari masing-masing variabel, sehingga dapat diidentifikasi latar belakang suatu fenomena, faktor-faktor penyebab / pendukung suatu fenomena serta mengungkap kendala dan peluang yang ada, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi.

Pertanyaan No. 2 tentang apakah hukum pasti ditegakkan oleh Polri yang berada di sekitar warga.

Dari hasil angket yang disebarakan pada 736 responden, maka sejumlah 290 atau sekitar 39,40 % berpendapat *Polisi dapat menegakkan hukum terhadap kejahatan / pelanggaran tertentu dan sebanyak 27,85 % atau 205 responden merasa yakin Polisi dapat menegakkan hukum yang berlaku.*

PERTANYAAN NO 2

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	6	7	0	9	26	48	6.52 (%)
b/2	51	44	18	31	49	193	26.22 (%)
c/3	82	81	41	41	45	290	39.40 (%)
d/4	49	61	39	27	29	205	27.85 (%)
S	188	193	98	108	149	736	100.00 (%)

Pertanyaan no 3 tentang bagaimana pelayanan Polri terhadap masyarakat. Atas dasar pengamatan yang dilihat dan dialami oleh 735 responden maka sebesar 385 (52,38 %) menjawab *memuaskan*, di lain pihak 268 (36,46 %) berpendapat *kurang memuaskan*.

PERTANYAAN NO 3

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	3	2	7	14	30	4.08 (%)
b/2	53	84	41	37	53	268	36.46 (%)
c/3	111	95	45	58	76	385	52.38 (%)
d/4	20	10	10	6	6	52	7.07 (%)
S	188	192	98	108	149	735	100.00 (%)

Pertanyaan No 4 tentang apakah dengan kehadiran anggota Polri, warga masyarakat yakin akan terhindar dari kejahatan / kecelakaan, maka dari 736 responden yang hadir menyatakan bahwa 361 (49,05 %) merasa yakin dan sebaliknya sejumlah 268 (36,41 %) merasa kurang yakin.

PERTANYAAN NO 4

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	11	12	8	7	13	51	6.93 (%)
b/2	62	67	36	40	63	268	36.41 (%)
c/3	99	102	47	51	62	361	49.05 (%)
d/4	17	12	6	10	11	56	7.61 (%)
S	189	193	97	108	149	736	100.00 (%)

Pertanyaan no 5 tentang keinginan dan anggapan masyarakat jika berhubungan dengan anggota Polri. Dari 735 responden setelah dipertanyakan tentang pendapat masyarakat pada saat berhubungan dengan anggota Polri, 481 (65,44 %) responden mengatakan mereka menganggap dan menginginkan anggota Polri sebagai aparat yang menjalankan tugasnya dan 189 responden menganggap anggota Polri sebagai sahabatnya.

PERTANYAAN NO 5

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	3	1	1	8	16	29	3.95 (%)
b/2	1	2	2	7	24	36	4.90 (%)
c/3	132	140	69	64	76	481	65.44 (%)
d/4	51	50	26	29	33	189	25.71 (%)
S	187	193	98	108	149	735	100.00 (%)

Pertanyaan No 6 tentang motivasi jalinan hubungan Polri dengan Masyarakat . Sejumlah 556 (76,37 %) dari 728 responden menginginkan menjalin hubungan yang erat dengan anggota-anggota Polri agar merasa damai atau terlindungi , sedangkan 93 responden lainnya ingin menjalin hubungan yang erat dengan anggota Polri karena motivasi ingin memanfaatkannya apabila ada urusan pribadi.

PERTANYAAN NO 6

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	3	2	1	8	13	27	3.71 (%)
b/2	3	5	5	11	28	52	7.14 (%)
c/3	23	18	8	12	32	93	12.77 (%)
d/4	155	166	83	76	76	556	76.37 (%)
S	184	191	97	107	149	728	100.00 (%)

Variabel B1 : Keberhasilan Community Policing dari Aspek tujuan / kemampuan Masyarakat

Pertanyaan no 7 tentang tanggapan masyarakat terhadap kewajiban mengamankan diri sendiri dan harta milik seseorang.

Tanggapan terhadap pernyataan bahwa mengamankan diri warga masyarakat dan harta milik seseorang menjadi kewajiban Polri, maka dari 732 responden, sebesar 57,10

% atau 418 responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan di atas dan 202 responden berpendapat kurang setuju.

PERTANYAAN NO 7

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	9	2	9	13	37	5.05(%)
b/2	15	11	6	12	31	75	10.25(%)
c/3	55	47	28	29	43	202	27.60(%)
d/4	110	125	62	59	62	418	57.10(%)
S	184	192	98	109	149	732	100.00(%)

Pertanyaan no 8. perihal tanggapan masyarakat atas pernyataan :

"Saya tetap memakai perhiasan yang saya miliki meskipun di tempat-tempat keramaian karena hal itu adalah hak pribadi saya", maka dari 736 responden, 320 responden atau 43,48 % menyatakan kurang setuju dan 275 responden atau 37,36 % lainnya tidak setuju.

PERTANYAAN NO 8

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	3	4	4	5	9	25	3.40 (%)
b/2	32	20	6	18	40	116	15.76 (%)
c/3	94	76	50	44	56	320	43.48 (%)
d/4	58	93	38	42	44	275	37.36 (%)
S	187	193	98	109	149	736	100.00 (%)

Pertanyaan no 9 tentang permintaan pengamanan/pengawasan oleh Polri.

Dari 737 responden, lebih dari setengah jumlah responden atau 439 (59,57 %) responden akan *meminta pengawasan* kepada pihak Polri bila akan membawa uang banyak atau barang-barang yang sangat berharga dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan 193 (26,19 %) lainnya akan *menyerahkan kepada perusahaan jasa* untuk dikirim ke alamat.

PERTANYAAN NO 9

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	7	8	5	10	18	48	6.51 (%)
b/2	9	11	2	11	24	57	7.73 (%)
c/3	107	138	69	54	71	439	59.57 (%)
d/4	65	36	22	34	36	193	26.19 (%)
S	188	193	98	109	149	737	100.00 (%)

Pertanyaan no 10 tentang tindakan warga masyarakat apabila menangkap pelaku kejahatan.

Bila melihat seorang penjahat yang tertangkap masa, dari 739 responden, sebanyak 601 (81.33 %) responden *melaporkan kepada Polisi* terdekat selebihnya sebanyak 71 responden atau 9.61% *bertindak mehakimi penjahat* tersebut baru diserahkan Polisi.

PERTANYAAN NO 10

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	2	0	3	7	16	2.17 (%)
b/2	13	14	0	12	32	71	9.60 (%)
c/3	3	3	2	6	37	51	6.90 (%)
d/4	169	174	96	89	73	601	81.33 (%)
S	189	193	98	110	149	739	100.00 (%)

Pertanyaan no 11 tentang tindakan warga masyarakat apabila dipanggil Polri untuk menjadi saksi dalam suatu perkara kejahatan.

Dari 737 responden, sebanyak 565 (76.66 %) responden akan datang dengan kesadaran sendiri apabila diminta menjadi saksi suatu perkara kejahatan, sementara sejumlah 80 (10,85 %) datang karena terpaksa.

PERTANYAAN NO 11

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	1	1	6	22	34	4.61 (%)
b/2	7	3	3	9	36	58	7.87 (%)
c/3	18	17	9	14	22	80	10.85 (%)
d/4	160	172	83	81	69	565	76.66 (%)
S	189	193	96	110	149	737	100.00 (%)

Pertanyaan No 12 tentang kesadaran masyarakat melaksanakan pengamanan lingkungan.

Bila mendapat giliran untuk ronda dan pengamanan lingkungan, dari 738 responden, sebanyak 619 (83.88 %) akan memenuhi kewajiban dengan kesadaran mereka sendiri, sedangkan sejumlah 50 responden (6,78 %) berpendapat bahwa pengamanan lingkungan hanya sebagai pindah tempat tidur di pos keamanan.

PERTANYAAN NO 12

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	2	1	1	7	17	28	3.79 (%)
b/2	3	3	5	6	24	41	5.56 (%)
c/3	18	0	2	5	25	50	6.78 (%)
d/4	166	189	89	92	83	619	83.88 (%)
S	189	192	97	110	149	738	100.00 (%)

Pertanyaan no 13 tentang kesadaran membangun Sistem Keamanan Swakarsa di lingkungan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk membangun Sistem Keamanan Swakarsa di lingkungan masing-masing, sebanyak 345 (47.46%) dari 727 responden berpendapat bahwa ingin membangkitkan kesadaran dan menjaga kekompakan sesama warga untuk secara terorganisir dan bersama-sama mencegah serta melawan setiap kejahatan dengan peralatan seadanya, dan sebagian lagi yaitu 284 responden (39.06 %) mengatakan akan melengkapi sarana komunikasi untuk berhubungan dengan polisi apabila sewaktu-waktu terjadi tindak kejahatan.

PERTANYAAN NO 13

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	15	13	10	12	21	71	9.77 (%)
b/2	83	81	50	57	74	345	47.46 (%)
c/3	4	6	2	3	12	27	3.71 (%)
d/4	81	92	33	37	41	284	39.06 (%)
S	183	192	95	109	148	727	100.00 (%)

Variabel B3 : Keberhasilan Community Policing dari Aspek Proses

Pertanyaan no 14 tentang tindakan masyarakat apabila terjadi provokasi dari luar.

Sebagian besar responden atau sejumlah 595 (81.17 %) dari 733 responden akan mencegah orang agar tidak terprovokasi dan menangkap provokator tersebut kemudian menyerahkannya kepada Polri, sedangkan 117 (15.96 %) berpendapat akan menolak ajakan provokator.

PERTANYAAN NO 14

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	1	0	0	0	1	2	0.27 (%)
b/2	2	1	1	4	11	19	2.59 (%)
c/3	32	21	11	18	35	117	15.96 (%)
d/4	154	167	86	86	102	595	81.17 (%)
S	189	189	98	108	149	733	100.00 (%)

Pertanyaan no 15 tentang Tindakan masyarakat bila ada provokasi untuk menyerang / menyakiti kelompok lain.

Bila ada informasi yang mengajak untuk menyerang atau menyakiti kelompok lain, maka dari 732 responden, 562 (76.78 %) akan menyadari bahwa itu adalah provokasi dan segera melaporkan kepada Polri sedangkan 96 (13.11 %) responden lainnya menyadari bahwa itu provokasi dan berdiam diri.

PERTANYAAN NO 15

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	16	1	3	6	12	38	5.19 (%)
b/2	3	0	8	7	18	36	4.92 (%)
c/3	19	12	13	16	36	96	13.11 (%)
d/4	149	177	74	79	83	562	76.78 (%)
S	187	190	98	108	149	732	100.00 (%)

Pertanyaan no 16 tentang Kepercayaan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi dilingkungannya. Dari 731 responden, 292 (39.95 %) responden kadang-kadang berupaya untuk mengetahui ada tidaknya kejahatan di sekitar mereka, sebaliknya sebesar 69 (9.44 %) responden tidak pernah berupaya untuk mengetahui ada tidaknya kejahatan di sekitar mereka.

PERTANYAAN NO 16

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	21	9	7	13	19	69	9.44 (%)
b/2	71	81	44	39	57	292	39.95 (%)
c/3	42	49	17	22	36	166	22.71 (%)
d/4	53	51	30	33	37	204	27.91 (%)
S	187	190	98	107	149	731	100.00 (%)

Pertanyaan no 17 tentang Pola berpikir masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan di lingkungannya.

Dari 732 responden, 310 (42.35 %) responden *kadang-kadang berfikir* bahwa ada hal atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan di sekitar mereka sedangkan 190 responden (25.96 %) lainnya *sering berfikir* seperti itu.

PERTANYAAN NO 17

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	16	12	8	13	13	62	8.47 (%)
b/2	78	81	49	39	63	310	42.35 (%)
c/3	47	55	18	28	42	190	25.96 (%)
d/4	47	42	23	27	31	170	23.22 (%)
S	188	190	98	107	149	732	100.00 (%)

Pertanyaan no 18 tentang Upaya menghindarkan diri agar tidak menjadi korban kejahatan.

Hampir secara keseluruhan dari 727 responden, berupaya untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi korban kejahatan. Adapun rinciannya adalah 474 responden (65.20 %) *selalu berupaya* untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi korban kejahatan sedangkan 110 (15.13 %) responden *sering berupaya* untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi korban kejahatan.

PERTANYAAN NO 18

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	14	7	7	14	17	59	8.12 (%)
b/2	17	23	9	9	26	84	11.55 (%)
c/3	26	13	22	14	35	110	15.13 (%)
d/4	129	145	60	69	71	474	65.20 (%)
S	186	188	98	106	149	727	100.00 (%)

Pertanyaan no 19 perihal Sumber informasi yang diperoleh masyarakat tentang kejahatan. Dari 726 responden, sebanyak 330 (45.45 %) responden mengetahui informasi tentang kejahatan *dari mass media*, sedangkan 243 (33.47 %) responden mengetahui informasi tersebut *dari lingkungan sekitar*.

PERTANYAAN NO 19

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	72	69	21	39	42	243	33.47 (%)
b/2	10	17	7	9	24	67	9.23 (%)
c/3	84	84	57	41	64	330	45.45 (%)
d/4	20	18	13	17	18	86	11.85 (%)
S	186	188	98	106	148	726	100.00 (%)

Variabel C : Kehidupan Agama

Pertanyaan no 20 perihal keyakinan bahwa menjalankan ibadah agama akan menimbulkan ketentraman.

Dari 734 responden, 354 (48.23 %) merasa *sangat yakin* bahwa apabila menjalankan ibadah agama akan merasa tenteram sedangkan 324 (44.14 %) responden merasa *yakin* tentram.

PERTANYAAN NO 20

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	5	12	4	2	2	25	3.41 (%)
b/2	4	12	2	2	11	31	4.22 (%)
c/3	80	97	39	46	62	324	44.14 (%)
d/4	97	72	53	58	74	354	48.23 (%)
S	186	193	98	108	149	734	100.00 (%)

Pertanyaan no 21 perihal tanggapan masyarakat terhadap pernyataan bahwa "Akan merasa tenang apabila meyakini bahwa segalanya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadaNya".

Dari 736 responden, 489 (66.44 %) responden merasa *yakin benar* akan pernyataan tersebut, sedangkan 23 (3.13%) responden menyatakan bahwa pernyataan tersebut *tidak benar*.

PERTANYAAN NO 21

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	5	12	1	2	3	23	3.13 (%)
b/2	6	55	1	7	18	87	11.82 (%)
c/3	21	46	9	19	42	137	18.61 (%)
d/4	156	80	87	80	86	489	66.44 (%)
S	188	193	98	108	149	736	100.00 (%)

Pertanyaan no 22. tentang pernyataan bahwa berbuat baik kepada orang lain akan menciptakan kedamaian.

Jumlah 375 (51.23 %) dari 732 responden merasa *yakin* bahwa pernyataan berbuat baik kepada orang lain akan menciptakan kedamaian sebagai sumber rasa aman, sedangkan 271 (37.02 %) responden merasa *sangat yakin* akan kebenaran pernyataan tersebut.

PERTANYAAN NO 22

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	2	17	1	2	3	25	3.42 (%)
b/2	10	28	3	3	17	61	8.33 (%)
c/3	92	100	56	56	71	375	51.23 (%)
d/4	82	48	38	46	57	271	37.02 (%)
S	186	193	98	107	148	732	100.00 (%)

Pertanyaan no 23 perihal kandungan kebenaran atas pernyataan bahwa jika memberikan sesuatu (harta / ilmu / tenaga atau jasa) kepada orang lain akan mendapat imbalan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dari 732 responden, 418 (57.10 %) responden menyatakan *benar* pernyataan tersebut dan 221 (30.19 %) responden lainnya menyatakan *mutlak benar*.

PERTANYAAN NO 23

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	7	1	3	3	18	2.46 (%)
b/2	6	31	3	8	27	75	10.25 (%)
c/3	123	114	48	60	73	418	57.10 (%)
d/4	54	41	46	36	44	221	30.19 (%)
S	187	193	98	107	147	732	100.00 (%)

Pertanyaan no 24 perihal pernyataan bahwa "Ketenangan hidup dapat dicapai melalui kebahagiaan berumah tangga berdasarkan sendi-sendi agama, kemudian memelihara hubungan baik dengan sesamanya".

Terdapat 366 (49.73 %) dari 736 responden *yakin benar* akan pernyataan tersebut sedangkan 312 (42.39 %) merasa sangat benar.

PERTANYAAN NO 24

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	9	2	0	0	11	1.49 (%)
b/2	3	23	0	0	21	47	6.39 (%)
c/3	93	106	49	54	64	366	49.73 (%)
d/4	92	55	47	54	64	312	42.39 (%)
S	188	193	98	108	149	736	100.00 (%)

Pertanyaan no 25 perihal tanggapan terhadap pernyataan bahwa "Ajaran agama hanya khusus untuk urusan akhirat dan tidak untuk urusan dunia"

Sejumlah 334 (45.57 %) dari 733 responden memberi tanggapan *sangat keliru* terhadap pernyataan tersebut diatas dan 245 (33.42 %) responden lainnya menyatakan *keliru* terhadap pernyataan tersebut.

PERTANYAAN NO 25

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	21	1	3	10	39	5.32 (%)
b/2	25	37	7	16	30	115	15.69 (%)
c/3	46	75	41	35	48	245	33.42 (%)
d/4	110	60	49	54	61	334	45.57 (%)
S	185	193	98	108	149	733	100.00 (%)

Pertanyaan no 26 perihal tanggapan masyarakat terhadap pernyataan bahwa : Ketenangan lahir dan batin bisa diperoleh apabila dapat mengendalikan diri dari pikiran, perkataan, dan perbuatan buruk terhadap orang lain.

Sebanyak 374 (50.88 %) dari 735 responden beranggapan bahwa pernyataan tersebut *benar*, sedangkan 277 (37.69 %) responden beranggapan bahwa pernyataan tersebut di atas *sangat benar*.

PERTANYAAN NO 26

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	16	2	6	6	34	4.63 (%)
b/2	4	26	1	5	14	50	6.80 (%)
c/3	92	105	57	48	72	374	50.88 (%)
d/4	88	46	37	49	57	277	37.69 (%)
S	188	193	97	108	149	735	100.00 (%)

Pertanyaan no 27 perihal tanggapan masyarakat terhadap pernyataan : "Perasaan iri dan dengki atas kenikmatan serta rejeki orang lain adalah sumber konflik dan rasa tidak tentram".

Sebanyak 371 (50.54 %) dari 734 responden memberi tanggapan *benar* terhadap pernyataan tersebut diatas, sedangkan 238 (32.43 %) responden beranggapan *sangat benar*.

PERTANYAAN NO 27

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	9	20	5	5	5	44	5.99 (%)
b/2	16	24	7	8	26	81	11.04 (%)
c/3	82	103	52	58	76	371	50.54 (%)
d/4	80	46	33	37	42	238	32.43 (%)
S	187	193	97	108	149	734	100.00 (%)

Variabel B2 Keberhasilan CP Aspek Petugas

Pertanyaan no 28 tentang Anggapan petugas terhadap masyarakat di lingkungan atau daerah binaannya.

Responden adalah para petugas Polri sejumlah 588 personil.

Dari 588 responden tersebut, 557 responden (94.73 %) menganggap bahwa masyarakat sebagai mitra dan hanya 14 responden (2.38 %) menganggap masyarakat binaan sebagai bawahannya.

PERTANYAAN NO 28

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	0	1	2	4	7	1.19 (%)
b/2	0	0	0	2	12	14	2.38 (%)
c/3	1	0	0	1	8	10	1.70 (%)
d/4	153	142	61	88	113	557	94.73 (%)
S	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 29. Tentang sikap petugas terhadap masyarakat lingkungannya.

Dari 588 responden, sebagian besar atau 510 (86.73 %) mengambil sikap terhadap masyarakat di lingkungannya, perlu diajak bersama-sama dalam menyelesaikan masalah mereka dan 31 (5.27 %) lainnya bersikap bahwa masyarakat binaan perlu dilatih secara militer agar terampil menanggulangi kejahatan. Pada pertanyaan nomor 29 tersebut ada jawaban pilihan yang berkaitan dengan proses penyidikan, namun ternyata tidak ada satu respondenpun yang memilih jawaban pilihan tersebut. Dari sini terlihat bahwa penguasaan profesionalisme di bidang penyidikan masing-masing anggota di lini terdepan masih lemah, dan pola pikir petugas Polri masih didominasi perilaku militer dan sifat gotong royong.

PERTANYAAN NO 29

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	3	3	3	7	20	3.40 (%)
b/2	0	0	0	3	28	31	5.27 (%)
c/3	1	6	4	1	15	27	4.59 (%)
d/4	149	133	55	86	87	510	86.73 (%)
S	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 30 berkaitan dengan pendapat responden (petugas Polri) terhadap pernyataan : "Saya tidak perlu menangani kejadian apapun di luar jam dinas karena segalanya sudah diatur oleh Pimpinan Satuan."

Dari 588 responden yang hadir, lebih dari setengah atau 339 responden (57.65 %) berpendapat *sangat keliru* terhadap pernyataan tersebut, sedangkan 6 responden (1.02 %) yang berpendapat *sangat benar*.

PERTANYAAN NO 30

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	0	1	0	5	6	1.02 (%)
b/2	0	4	3	5	19	31	5.27 (%)
c/3	51	60	23	26	52	212	36.05 (%)
d/4	103	78	35	62	61	339	57.65 (%)
S	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan No 31 tentang bagaimana pendapat responden terhadap pernyataan : "Saya tidak usah ikut campur kejadian apapun di lingkungan sekitar saya karena sudah ada petugas khusus yang menangani kejadian tersebut".

Jumlah responden seluruhnya 587 personil, sebanyak 285 (48.55%) berpendapat bahwa pernyataan tersebut *sangat keliru* dan sebanyak 247 (42.08 %) berpendapat pernyataan tersebut *keliru*. Disini tampak bahwa petugas Polri sangat peduli terhadap lingkungannya, walaupun sudah ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi masyarakat setempat.

PERTANYAAN NO 31

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	0	1	2	11	14	2.39 (%)
b/2	1	4	4	4	28	41	6.98 (%)
c/3	63	64	30	39	51	247	42.08 (%)
d/4	89	74	27	48	47	285	48.55 (%)
S	153	142	62	93	137	587	100.00 (%)

Pertanyaan No 32 tentang kepedulian petugas Polri terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sekitarnya.

Dari 588 responden, 277 responden (47.11 %) menyatakan *sangat keliru* terhadap pernyataan : "Saya tidak peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat karena hal itu adalah urusan mereka". dan 268 responden (45.58 %) menyatakan pernyataan tersebut *keliru*. Dengan demikian sebenarnya secara umum tingkat kepedulian anggota Polri terhadap lingkungannya sangat tinggi.

PERTANYAAN NO 32

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	0	0	1	5	6	1.02 (%)
b/2	2	2	0	3	30	37	6.29 (%)
c/3	70	71	32	43	52	268	45.58 (%)
d/4	82	69	30	46	50	277	47.11 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 33 tentang pendapat petugas terhadap sistem keamanan lingkungan.

Terhadap pernyataan berikut : "Masyarakat tidak perlu ikut campur mengelola sistem keamanan karena hal itu adalah wewenang saya selaku anggota Polri", sebanyak 266 (45.24 %) dari 588 responden berpendapat pernyataan tersebut *sangat keliru*, sedangkan sebanyak 10 responden (1.70 %) menganggap pernyataan tersebut *sangat benar*.

PERTANYAAN NO 33

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	0	0	3	2	5	10	1.70 (%)
b/2	3	10	1	4	38	56	9.52 (%)
c/3	65	68	29	45	49	256	43.54 (%)
d/4	86	64	29	42	45	266	45.24 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan No 34 tentang pendapat responden (petugas Polri) terhadap pernyataan: "Agar tidak tumpang tindih kewenangan, maka hanya fungsi Bimmas dan Sabhara Pol yang mempunyai tugas memberdayakan masyarakat untuk mencegah kejahatan".

Sejumlah 288 (48.98 %) dari 588 responden berpendapat bahwa pernyataan tersebut *keliru*, dan 207 responden (35.20 %) lainnya berpendapat *sangat keliru*. Dari jawaban ini secara umum anggota telah memahami bahwa tugas memberdayakan masyarakat bukan hanya menjadi beban fungsi Sabhara dan Bimmas tetapi juga fungsi-fungsi yang lain.

PERTANYAAN NO 34

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	3	6	3	3	9	24	4.08 (%)
b/2	10	6	8	11	34	69	11.73 (%)
c/3	79	79	31	45	54	288	48.98 (%)
d/4	62	51	20	34	40	207	35.20 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan No 35 tentang keterkaitan pendidikan kejuruan dengan penugasan anggota Polri.

Dari 585 Responden, 251 responden (42.91 %) bertugas sudah sesuai dengan dikjur yang dimiliki dan 196 (33.50 %) bertugas tanpa Dikjur.

PERTANYAAN NO 35

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	52	57	22	32	33	196	33.50 (%)
b/2	34	15	8	15	38	110	18.80 (%)
c/3	62	62	29	44	54	251	42.91 (%)
d/4	4	8	2	2	12	28	4.79 (%)
∑	152	142	61	93	137	585	100.00 (%)

Pertanyaan no 36 tentang perbandingan antara beban tugas dengan penghasilan responden (anggota Polri).

Berdasarkan pengalaman responden maka perbandingan antara gaji serta tunjangan yang diterima dengan beban tugas yang dilaksanakan, 349 (59.45 %) dari jumlah responden (587 personil) menyatakan bahwa gaji dan tunjangan jauh lebih kecil di bandingkan beban tugas, sedangkan 174 responden (29.64 %) berpendapat gaji dan tunjangan hampir memadai bila dihadapkan pada beban tugas.

PERTANYAAN NO 36

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	95	100	46	49	59	349	59.45 (%)
b/2	44	36	16	34	44	174	29.64 (%)
c/3	14	5	0	8	23	50	8.52 (%)
d/4	0	1	0	2	11	14	2.39 (%)
∑	153	142	62	93	137	587	100.00 (%)

Pertanyaan no 37 tentang perbandingan sarana - prasarana dengan beban tugas.

Menurut 429 personil (72.96 %) dari 588 responden berpendapat bahwa sarana / prasarana *jauh lebih kecil* dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban, sedangkan 120 responden (20.41 %) berpendapat bahwa sarana / prasarana *hampir memadai* dengan beban tugas.

PERTANYAAN NO 37

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	132	101	47	74	75	429	72.96 (%)
b/2	18	34	14	17	37	120	20.41 (%)
c/3	4	7	1	1	12	25	4.25 (%)
d/4	0	0	0	1	13	14	2.38 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 38 tentang perbandingan antara dukungan anggaran dengan beban tugas.

Dari 588 responden, 423 (71.94 %) menyatakan bahwa dukungan anggaran *jauh lebih kecil* dibandingkan dengan beban tugas, sedangkan 132 responden (22.45 %) menyatakan dukungan anggaran *hampir memadai* beban tugas.

PERTANYAAN NO 38

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	120	118	51	66	68	423	71.94 (%)
b/2	28	22	10	25	47	132	22.45 (%)
c/3	6	2	1	1	16	26	4.42 (%)
d/4	0	0	0	1	6	7	1.19 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 39 tentang perbandingan alat transportasi berikut BBM-nya dengan beban tugas.

Sejumlah 420 (71.43 %) dari 588 responden berpendapat alat transportasi serta BBM *jauh lebih kecil* di bandingkan dengan beban tugas yang harus dihadapi sedangkan 107 responden (18.20 %) beranggapan bahwa alat transportasi serta BBM *hampir memadai* jika dihadapkan dengan beban tugas.

PERTANYAAN NO 39

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	123	113	41	67	76	420	71.43 (%)
b/2	20	15	17	19	36	107	18.20 (%)
c/3	7	10	4	3	13	37	6.29 (%)
d/4	4	4	0	4	12	24	4.08 (%)
∑	154	142	62	93	137	588	100.00 (%)

Pertanyaan no 40 tentang tindakan yang harus diambil apabila responden sedang pulang dari kantor, ada warga masyarakat yang melapor sesuatu masalah yang dialaminya.

Sejumlah 342 (58.46 %) dari 585 responden akan *menerima laporan dan menyalurkan* kepada satwil terdekat, sedangkan sejumlah 144 responden lainnya (24.26 %) akan *menerima laporan dan mencari upaya jalan keluarnya*.

PERTANYAAN NO 40

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	4	2	6	7	19	38	6.50 (%)
b/2	7	12	0	12	30	61	10.43 (%)
c/3	96	90	49	50	57	342	58.46 (%)
d/4	44	38	7	24	31	144	24.62 (%)
∑	151	142	62	93	137	585	100.00 (%)

Pertanyaan no 41 tentang kemampuan Babinkamtibmas dalam mengetahui dan menangkap penjahat di lingkungan wilayah binaannya.

Sebesar 369 (75.31 %) dari 490 responden (Petugas Babinkamtibmas) menyatakan kurang dari 2 orang tersangka yang berhasil diketahui dan ditangkap dengan atau tanpa bantuan masyarakat (rata-rata dalam 1 bulan), dan sejumlah 77 responden (15.71 %) menyatakan berhasil menangkap 2 - 4 orang tersangka.

PERTANYAAN NO 41

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	99	96	34	66	74	369	75.31 (%)
b/2	9	38	10	6	14	77	15.71 (%)
c/3	2	5	2	1	18	28	5.71 (%)
d/4	4	3	2	1	6	16	3.27 (%)
∑	114	142	48	74	112	490	100.00 (%)

Pertanyaan no 42 tentang Banyaknya Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh petugas Babinkamtibmas.

Fungsi Bimmas Pol adalah fungsi yang paling banyak dilaksanakan oleh Babinkamtibmas. Ini bisa dibuktikan dari 496 responden (Petugas Babinkamtibmas), 305 responden (61.49 %) banyak melaksanakan Fungsi Bimmas, disusul Fungsi Sabhara / Fungsi Lantas dilaksanakan oleh 70 (14.11 %) responden lainnya.

PERTANYAAN NO 42

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	13	3	7	16	15	54	10.89 (%)
b/2	8	11	3	9	36	67	13.51 (%)
c/3	22	11	10	9	18	70	14.11 (%)
d/4	77	117	29	40	42	305	61.49 (%)
∑	120	142	49	74	111	496	100.0 (%)

Pertanyaan no 43 tentang prioritas melaksanakan metode penugasan yang dijalankan oleh Babinkamtibmas.

Sejumlah 391 (78.83 %) dari 496 responden memprioritaskan menjalankan tugas Babinkamtibmas dengan metode memahami masalah dalam masyarakat kemudian menyelesaikan bersama-sama masyarakat, sedangkan 53 responden (10.69 %) lainnya memprioritaskan dengan metode mencegah kejahatan dengan banyak melakukan patroli.

PERTANYAAN NO 43

Skala	Polda					Total (%)	
	BALI	METRO JAYA	JABAR	RIAU	SUMUT		
a/1	1	6	1	4	4	16	3.23 (%)
b/2	12	7	6	10	18	53	10.69 (%)
c/3	3	8	2	5	18	36	7.26 (%)
d/4	104	121	40	55	71	391	78.83 (%)
∑	114	142	49	74	111	496	100.0 (%)

PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang akan dicarikan data di lapangan, yakni :

- Variabel "Police Population Ratio (PPR)".
- Variabel "Rasa aman masyarakat".
- Variabel "Pelaksanaan community Policing"
- Variabel "Kehidupan agama"

Pola analisis ini kurang tepat diaplikasikan untuk menggeneralisasi keadaan di seluruh Indonesia karena masing-masing Polda (daerah sasaran penelitian) memiliki karakteristik dan kerawanan masing-masing, sehingga di bawah ini akan dilakukan analisis masing-masing Polda.

Sesuai desain yang telah disusun sebelumnya, maka pola analisis mengacu pada pembuktian hipotesa sebagai berikut:

- a. Penambahan jumlah Polri (sesuai target PPR) tidak serta merta dapat meningkatkan rasa aman masyarakat bila diasumsikan bahwa rasa aman sangat dipengaruhi oleh trend kejahatan.

Untuk membuktikan hipotesa ini, perlu diukur secara kuantitatif tentang derajat korelasi antara variabel "Police Population Ratio (PPR)" dengan variabel "Rasa Aman Masyarakat" yang diasumsikan dengan variabel trend kejahatan. Hasil pengukuran derajat korelasi 3 kemungkinan :

- Apabila correlation value di bawah 0,1 artinya *no correlation*.
- Apabila correlation value antara 0,1 – 0,6 artinya *average*
- Apabila correlation value di atas 0,6 artinya *strong correlation*

- b. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat rasa aman masyarakat terhadap faktor keberhasilan Polisi dalam melaksanakan Community Policing dan kadar kehidupan beragama serta pranata adat yang dipatuhi oleh masyarakat lokal.

Pengukuran variabel "rasa aman masyarakat" dilaksanakan dengan menggunakan skala *Lickert* dengan daerah bias antara 1 s/d 4 untuk empat kategori jawaban dari masing-masing pertanyaan. Rata-rata (mean) dari skala jawaban merupakan skor yang

menunjukkan tingkat kualifikasi variabel "rasa aman masyarakat"

- Skor dibawah angka 2 : kualifikasi Buruk
- Skor diantara 2 – 3 : kualifikasi Kurang
- Skor di atas 3 : kualifikasi Baik
- Skor mendekati 4 : kualifikasi Baik sekali

Selanjutnya dengan cara yang sama diukur pula variabel "Pelaksanaan Community Policing" dan "tingkat kehidupan agama / adat masyarakat lokal". Dalam kaitan pengaruh terhadap variabel rasa aman masyarakat, maka ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

- Apabila skor variabel "rasa aman" positif, maka variabel lain yang menunjukkan skor paling positif adalah variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel : rasa aman masyarakat".
- Sebaliknya bila variabel rasa aman "menunjukkan skor negatif, maka variabel lain yang paling negatif adalah variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel "rasa aman masyarakat"

Keadaan Polda Bali

a. Pengukuran Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Tingkat rasa aman masyarakat Bali diukur dengan menghitung skor seperti tertera pada tabel berikut.

No.	LOKASI	Mean
1.	Polres Gianyar	3,343
2.	Polres Klungkung	3,219
3.	Polres Bangli	3,184
4.	Polres Tabanan	2,913
5.	Polres Jembrana	3,345
6.	Polres Karang Asem	3,073
7.	Polres Buleleng	3,384
8.	Poltabes Denpasar	3,083
Skor		3,193

Skor sebesar 3,193 ini menggambarkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Bali baik, karena skor tersebut berada di atas angka 3 (standar baik).

b. Pengukuran Keberhasilan Community Policing

Pengukuran keberhasilan community policing juga menggunakan teknik scoring seperti tercantum dalam tiga tabel di bawah ini :

- 1) Keberhasilan CP dari Aspek tujuan / Puan Masyarakat

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Gianyar	3,437
2	Polres Klungkung	3,474
3	Polres bangli	3,419
4	Polres Tabanan	3,383
5	Polres Jembrana	3,408
6	Polres karang Asem	3,504
7	Polres Buleleng	3,472
8	Poltabes Denpasar	3,245
Skor		3,418

2) Keberhasilan CP dari Aspek Petugas

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Gianyar	2,820
2	Polres Klungkung	2,732
3	Polres Bangli	2,719
4	Polres Tabanan	2,612
5	Polres Jembrana	2,800
6	Polres karang Asem	2,731
7	Polres Buleleng	2,572
8	Poltabs Denpasar	2,875
Skor		2,733

3) Keberhasilan CP dari Aspek Agama

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Gianyar	2,917
2	Polres Klungkung	3,044
3	Polres Bangli	3,132
4	Polres Tabanan	3,113
5	Polres Jembrana	3,452
6	Polres Karang Asem	3,208
7	Polres Buleleng	3,188
8	Poltabs Denpasar	2,817
Skor		3,109

4) Rekapitulasi

Sub Variabel	Skor
B 1	3,418
B2	2,733
B3	3,109
Mean Skor	3,087

Total Skor ini menunjukkan bahwa *Community Policing* di Polda Bali juga telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh anggota pada lini terdepan dan para Babinkamtibmas.

c. Tingkat Kehidupan Agama

Tingkat kehidupan beragama / adat di Bali juga perlu diukur dengan menggunakan teknik *scoring* sebagai berikut :

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Gianyar	3,397
2	Polres Klungkung	3,421
3	Polres Bangli	3,272
4	Polres Tabanan	3,455
5	Polres Jembrana	3,473
6	Polres Karang Asem	3,484
7	Polres Buleleng	3,380
8	Poltabs Denpasar	3,204
Skor		3,386

Skor **3,386** pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama masyarakat Bali sudah sangat mantap dan *sangat baik* karena angkanya jauh di atas angka 3 (standar minimal). Tingkat kehidupan agama yang demikian memiliki *derajat kemungkinan tertinggi* sebagai faktor penyebab tingginya tingkat rasa aman masyarakat. Hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dengan analisis statistik untuk mencari *Correlation Value* kedua variabel tersebut diatas.

Hubungan antara variabel "rasa Aman Masyarakat" dengan "Police Population Ratio (PPR)"

Apabila dikaitkan dengan data-data PPR selama 7 tahun, maka jelas terlihat bahwa kenaikan atau penurunan jumlah perbandingan polisi dan masyarakat tidak serta merta menaikkan atau menurunkan Crime Total.

sebagai kontributor tumbuhnya *rasa aman* masyarakat. Dari tabel dibawah ini terlihat jelas bahwa kenaikan jumlah Polri tahun 1995 s/d 1997 ternyata malah menaikkan jumlah kejahatan (CT) pada tahun yang sama.

DATA Police Population Ratio (PPR) dan Crime Total (CT)

TAHUN	C.T	C.C	CR	PPR
1995	2549	1157	45,97 %	1 : 568
1996	2643	1204	45,55 %	1 : 559
1997	2737	1528	55,82 %	1 : 471
1998	5448	2637	48,40 %	1 : 499
1999	8124	3377	41,56 %	1 : 499
2000	7914	3554	44,91 %	1 : 354
2001	5409	3153	58,30 %	1 : 316

Pengaruh PPR terhadap tingginya rasa aman masyarakat

Data menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara PPR dengan rasa aman di dalam masyarakat. Hal ini dapat dianalisis dari trend perkembangan antara PPR dengan Crime Total. Seharusnya setiap ada *kenaikan jumlah anggota Polri* (atau kenaikan) PPR maka akan diikuti *penurunan crime total*.

Tetapi pada kenyataan, kenaikan jumlah Polri dengan PPR tidak selalu berakibat penurunan angka kejahatan

Faktor dominan sebagai penyebab tingginya rasa aman

Dilihat dari skor masing-masing variabel penyebab rasa aman masyarakat maka skor tertinggi adalah *kehidupan agama* dengan skor 3,426. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kehidupan beragama dan budaya masyarakat Bali merupakan faktor dominan penyebab tumbuhnya rasa aman di dalam masyarakat.

		Rasa Aman	Kehidupan Agama
Rasa Aman	Pearson Correlation	1.000	.137
	Sig. (2-tailed)	.	.061
	N	189	189
Kehidupan Agama	Pearson Correlation	.137	1.000
	Sig. (2-tailed)	.061	.
	N	189	189

Analisa statistik menghasilkan nilai korelasi yang positif, yakni **0,137**. Hal ini membuktikan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Bali lebih banyak disebabkan oleh mantapnya kehidupan beragama dan adat di Polda Bali.

Keadaan ini dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut (hasil wawancara) :

- (1) Proses Akulturasi nilai dan norma keagamaan didalam tata kehidupan masyarakat berjalan cukup intensif sehingga terdapat relevansi prinsip dan sinergi untuk membangun rasa aman masyarakat.
- (2) Ikatan emosional yang kuat di antara warga masyarakat dalam satu desa adat (Banjar) telah menumbuhkan solidaritas yang kuat untuk mencegah segala bentuk gangguan yang dianggap merugikan Banjar.
- (3) Masih kuatnya kontrol sosial dari aturan adat (awig-awig) yang disertai sanksi adat untuk menciptakan *sistim koreksi* yang efektif terhadap masyarakat banjanya.

Faktor lain sebagai pendukung tingginya rasa aman

- a) Faktor pendukung terciptanya rasa aman masyarakat adalah upaya *community Policing* yang dilaksanakan Polda Bali beserta jajaran hal ini dapat dilihat dari skor yang cukup tinggi yakni sebesar 3,109 (masih di atas 3).
- b) Keadaan ini didukung dengan hal-hal sebagai berikut (hasil wawancara) :
 - (1) Penambahan-penambahan personel yang eksodus dari luar Polda Bali tidak memberikan beban tam-

bahan kepada Kesatuan, karena mereka pada umumnya sudah mempunyai rumah tempai tinggal dan transportasi (motor roda dua).

- (2) Kemampuan untuk mencari *income* sampingan melalui ke-trampilan mereka tidak membebani kesatuan dan bahkan mereka dapat dimanfaatkan untuk melakukan *Community Policing* melalui masyarakat adat di lingkungan masing-masing.
- (3) Adanya kebijakan Kapolda untuk membangun kepercayaan (*building trust*) masyarakat melalui sentuhan *Cultural Religius* dalam wujud kesenian "Boudres" dan pemberdayaan "Pecalang" sebagai polisi adat.

Keadaan Polda Metro Jaya

- a. Pengukuran Tingkat rasa aman masyarakat

Tingkat rasa aman masyarakat Jakarta diukur dengan menghitung skor seperti tertera pada tabel berikut :

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Tangerang	3,153
2	Polres Jakbar	3,314
3	Polres Bekasi	3,037
4	Polres Jaktim	3,194
5	Polres Jakpus	3,075
6	Polres Jakut	3,202
7	Polres Jaksel	3,113
8	Polres Depok	3,227
Skor		3,164

Skor sebesar 3,164 ini menggambarkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Metro Jaya *baik*, karena skor tersebut berada di atas angka standar (3).

b. Pengukuran Tingkat Keberhasilan Community Policing

Pengukuran keberhasilan community policing juga menggunakan teknik scoring seperti tercantum dalam tiga tabel di bawah ini :

1) Keberhasilan CP dari Aspek tujuan / Puan Masyarakat

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Tangerang	3,619
2	Polres Jakbar	3,454
3	Polres Bekasi	3,595
4	Polres Jaktim	3,458
5	Polres Jakpus	3,521
6	Polres Jakut	3,414
7	Polres Jaksel	3,447
8	Polres Depok	3,506
Skor		3,502

2) Keberhasilan CP dari Aspek Petugas

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Tangerang	2,715
2	Polres Jakbar	2,821
3	Polres Bekasi	2,675
4	Polres Jaktim	2,891
5	Polres Jakpus	2,776
6	Polres Jakut	2,605
7	Polres Jaksel	2,766
8	Polres Depok	2,895
Skor		2,768

3) Keberhasilan CP dari Aspek Agama

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Tangerang	3,403
2	Polres Jakbar	2,971
3	Polres Bekasi	3,296
4	Polres Jaktim	2,938
5	Polres Jakpus	3,177
6	Polres Jakut	3,197
7	Polres Jaksel	3,177
8	Polres Depok	3,228
Skor		3,173

4) Rekapitulasi

Sub Variabel	Skor
B 1	3,502
B2	2,768
B3	3,173
Mean Skor	3,148

Total skor sebesar 3,148 ini menunjukkan bahwa *Community Policing* di Polda Metro Jaya telah dilaksanakan dengan baik oleh anggota operasional pada lini terdepan dan para Babinkamtibmas.

c. Kehidupan Agama

Tingkat kehidupan beragama / adat di Jakarta juga perlu diukur dengan menggunakan teknik scoring sebagai berikut :

No.	LOKASI	Mean
1	Polres Tangerang	3,010
2	Polres Jakbar	3,022
3	Polres Bekasi	2,993
4	Polres Jaktim	3,036
5	Polres Jakpus	2,960
6	Polres Jakut	3,013
7	Polres Jaksel	2,903
8	Polres Depok	3,023
Skor		2,995

Total Skor **2,995** pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama dan adat masyarakat di Polda Metro Jaya termasuk kategori kurang baik.

Hubungan antara variabel "rasa Aman Masyarakat" dengan "Police Population Ratio (PPR)"

Apabila dikaitkan dengan data-data PPR selama 7 tahun, maka jelas terlihat bahwa kenaikan atau penurunan jumlah perbandingan polisi dan masyarakat tidak serta merta menaikkan atau menurunkan Crime Total.

Pengaruh PPR terhadap angka kejahatan

Data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara PPR dengan angka kriminalitas di dalam masyarakat. Hal ini dapat dianalisis dari trend perkembangan antara PPR dengan Crime Total. Selama 7 tahun seharusnya setiap ada kenaikan jumlah anggota Polri (atau kenaikan) PPR maka akan diikuti penurunan crime total.

Tetapi pada kenyataan, kenaikan jumlah Polri dengan PPR tidak selalu berakibat penurunan angka kejahatan. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kenaikan jumlah Polri tahun 1998 s/d 2001 ternyata malah menaikkan jumlah kejahatan (CT) pada tahun yang sama.

Tingginya angka kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan arus reformasi serta ciri-ciri masyarakat modern yang mempunyai kecenderungan sebagai berikut :

- Semakin banyaknya dan beragam kepentingan masyarakat
- Semakin mendahulukan kepentingan individu masing-masing
- Hubungan lebih banyak bersifat ra-

DATA Police Population Ratio (PPR) dan Crime Total (CT)

TAHUN	PPR	C.T	C.C	CR
1995	1 : 1.183	20233	11539	57 %
1996	1 : 1.145	19145	10108	53 %
1997	1 : 1.167	17735	10313	58,1 %
1998	1 : 1.142	17295	9884	57 %
1999	1 : 1.020	18437	10870	58,9 %
2000	1 : 910	18578	10569	56,8 %
2001	1 : 876	33390	12301	36,84 %

tional di banding dengan emosional

- Sistem kekerabatan sudah tidak lagi bersifat *paguyuban* tetapi bersifat *patembayan*.

Pengaruh angka kejahatan terhadap rasa aman masyarakat.

Tingginya tingkat rasa aman masyarakat Jakarta selaras dengan sifat dan corak masyarakat metropolitan yang lebih banyak bersikap *easy going* terhadap keadaan di sekeliling dirinya. Fenomena ini terlihat semakin jelas sejak bergulirnya era reformasi yang penuh hingar bingar konflik sosial, kejahatan dan unjuk rasa yang cenderung anarkis. Masyarakat ibukota seolah-olah sudah terbiasa dan "kebal" terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun tidak banyak menimbulkan rasa takut untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Di samping itu masyarakat Jakarta juga sudah sangat toleran terhadap penderitaan dan keprihatinan sebagai akibat kerasnya kehidupan dan persaingan dalam mencari nafkah. Dengan demikian tidak nampak adanya pengaruh yang signifikan dari angka kejahatan terhadap

rasa aman di dalam masyarakat. Fenomena lokal yang dapat dijadikan indikator antara lain sebagai berikut :

- Dalam keadaan apapun tempat-tempat hiburan tetap dibuka dan dikunjungi pelanggan.
- Banyak unjuk rasa (termasuk yang anarkis sekalipun) sering malah dijadikan bahan tontonan yang menarik masyarakat sekitarnya.
- Rasa takut / panik terhadap teror bom hanya pada lokasi yang bersangkutan saja dan tidak meluas.

Faktor dominan sebagai penyebab tingginya rasa aman

(a) Dilihat dari skor masing-masing variabel penyebab rasa aman masyarakat maka skor tertinggi adalah *Community Policing* dengan skor **3,149** (lihat tabel tingkat keberhasilan *Community Policing* di depan). Hal ini berarti bahwa efektifnya upaya *Community Policing* di wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan faktor dominan penyebab tumbuhnya rasa aman di dalam masyarakat. Hal ini didukung pembuktian statistikal sebagai berikut:

		Rasa Aman	Community Policing
Rasa Aman	Pearson Correlation	1.000	.154
	Sig. (2-tailed)	.	.068
	N	142	142
Community Policing	Pearson Correlation	.154	1.000
	Sig. (2-tailed)	.068	.
	N	142	142

Dari data diatas terlihat jelas bahwa nilai korelasi antara rasa aman masyarakat dengan community policing cukup positif yakni 0,154. Hal ini memperkuat asumsi bahwa rasa aman masyarakat Polda Metro Jaya lebih banyak disebabkan faktor community policing dan dampak globalisasi dan corak masyarakat yang patembayan.

(b) Keadaan ini dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

(1) Adanya kebijakan Kapolda Metro Jaya untuk menggelar kekuatan se-optimal mungkin di lapangan dan pada unit-unit operasional terdepan. Plotting anggota Polri pada titik-titik rawan tidak saja dilakukan oleh anggota fungsi operasional, tetapi juga anggota-anggota yang bertugas pada fungsi pembinaan dan pelayanan. Para anggota Polri yang bertugas di Staf terus di dorong ke lapangan dan jumlahnya terus berkurang hingga mencapai 3,7 sampai 21 persen dari jumlah seluruh personil yang ada. Pelaksanaan tugas pada bidang Staf Pelayanan dan Pembinaan diperkuat dengan pemberdayaan personil PNS.

(2) Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di laksanakan dengan metode "Lintas Fungsi Operasional" yang pengendaliannya diserahkan kepada seluruh fungsi operasional secara bergantian.

Pendelegasian wewenang mengambil keputusan sampai pada tingkat *diskresi* telah diupayakan secara konsisten, sehingga tumbuh rasa tanggungjawab yang besar terhadap tercapainya tujuan tugas, terutama dimulai para perwiranya.

(3) Penggelaran petugas dilapangan telah menyentuh kebutuhan masyarakat pada semua lapisan dengan pendekatan "logika" bahwa kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan, setidaknya untuk mempercepat pemecahan problema secara bersama antara petugas Polri dengan masyarakat sekitarnya. Metoda ini telah digunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*Building Trust*) dalam rangka menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat Jakarta yang bercorak *Patembayan* ini.

(4) Kegiatan Community Policing yang menonjol dan cocok dengan corak masyarakat DKI adalah adanya upaya untuk mengorganisir dan memberdayakan potensi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat terpinggirkan yang sarat kerawanan. Kelompok-kelompok masyarakat yang siap untuk mengatasi permasalahan dan merupakan hasil social engineer-

ing antara lain Citra Bhayangkara, Kelompok Sadar Kamtibmas, Forum persaudaraan Antar Etnis (memerangi narkoba dan konflik sosial), Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Komunikasi Antar Suku.

(5) Upaya untuk merubah paradigma lama (persepsi diri sebagai *penguasa* yang berorientasi pada kewenangan) kearah paradigma baru (persepsi diri sebagai *pelayan*, pengayom dan pelindung masyarakat) telah mulai dilaksanakan melalui beberapa program antara lain :

- Penggunaan blangko tegoran simpati kepada para pelanggar Lalulintas.
- Patroli terpadu pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk.
- Kegiatan penggalangan ke seluruh kelompok masyarakat baik yang berpotensi positif maupun negatif dengan teknik "Wajib Kunjung" dan "Negosiasi" untuk meredam konflik serta kerusuhan sosial.

Keadaan Polda Jabar

a. *Pengukuran Tingkat Rasa Aman Masyarakat*

Tingkat rasa aman masyarakat Jawa Barat diukur dengan menghitung skor seperti tertera pada tabel berikut :

No.	LOKASI	Mean
1	Polresta Bogor	3,019
2	Polres Bandung Barat	3,384
3	Polres Bandung	3,136
4	Polwiltabes Bandung	2,940
Skor		3,120

Skor 3,120 menggambarkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Jabar adalah *baik*, karena skor tersebut berada di atas kriteria baik (3).

b. *Pengukuran Community Policing*
Pengukuran keberhasilan community policing juga menggunakan teknik scoring seperti tercantum dalam tiga tabel di bawah ini :

1) Keberhasilan CP dari Aspek tujuan / Puan Masyarakat

No.	LOKASI	Mean
1	Polresta Bogor	3,413
2	Polres Bandung Barat	3,385
3	Polres Bandung	3,474
4	Polwiltabes Bandung	3,400
Skor		3,418

2) Keberhasilan CP dari Aspek Petugas

No.	LOKASI	Mean
1	Polresta Bogor	3,043
2	Polres Bandung Barat	2,774
3	Polres Bandung	2,667
4	Polwiltabes Bandung	2,612
Total skor		2,774

3) Keberhasilan CP dari Aspek Agama

No.	LOKASI	Mean
1	Polresta Bogor	3,333
2	Polres Bandung Barat	3,239
3	Polres Bandung	3,043
4	Polwiltabes Bandung	3,113
Total skor		3,182

4) Rekapitulasi

Sub Variabel	Skor
B 1	3,418
B2	2,774
B3	3,182
Mean Skor	3,125

Meanskor sebesar 3,125 menunjukkan bahwa *Community Policing* di Polda Jabar telah dilaksanakan dengan baik oleh anggota operasional pada lini terdepan dan para Babinkamtibmas, karena kondisi di wilayah Jawa Barat didukung oleh aspek agama dan kemampuan masyarakat sendiri.

c. Pengukuran Kehidupan Agama

Tingkat rasa aman masyarakat Jawa Barat diukur dengan menghitung skor seperti tertera pada tabel berikut

No.	LOKASI	Mean
1	Polresta Bogor	3,460
2	Polres Bandung Barat	3,451
3	Polres Bandung	3,440
4	Polwiltabes Bandung	3,455
Total skor		3,452

Total Skor sebesar **3,452** pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama masyarakat di Polda Jabar termasuk kategori Baik bahkan mendekati variabel sangat baik (nilai 4).

Hubungan antara variabel "rasa Aman Masyarakat" dengan "Police Population Ratio (PPR)"

Apabila dikaitkan dengan data-data PPR selama 7 tahun, maka jelas terlihat bahwa kenaikan atau penurunan jumlah perbandingan polisi dan masyarakat tidak serta merta menaikkan atau menurunkan Crime Total.

DATA *Police Population Ratio (PPR)* dan *Crime Total (CT)*

TAHUN	PPR	CT	C.CL
1995	1:2.236	13.596	6.767
1996	1:2.219	14.563	7.606
1997	1:2.235	15.661	7.940
1998	1:2.216	17.469	8.988
1999	1:2.282	17.941	8.762
2000	1:2.193	17.197	8.563
2001	1:2.068	17.455	9.105

Pengaruh PPR terhadap angka kejahatan

Apabila memperhatikan tabel data PPR dan Crime Total di bawah ini, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara PPR dengan angka kriminalitas di dalam masyarakat. Hal ini dapat dianalisis dari trend perkembangan antara PPR dengan Crime Total selama 7 tahun. Seharusnya setiap ada kenaikan jumlah anggota Polri atau kenaikan PPR, akan diikuti dengan

penurunan crime total, tetapi pada kenyataannya setiap penambahan anggota Polri (PPR) tidak selalu berakibat penurunan angka kejahatan. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kenaikan jumlah Polri tahun 1998 s/d 2001 ternyata tidak menurunkan jumlah kejahatan (CT) pada tahun yang sama.

Pengaruh angka kejahatan terhadap rasa aman masyarakat.

- (a) Memperhatikan tabel hasil penelitian berdasarkan variabelnya di mana rasa aman masyarakat menunjukkan angka (3,12) yang berarti di atas nilai baik namun masih di bawah kriteria sangat baik (4,0) dikaitkan dengan data PPR, CT, CCL, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya angka kejahatan belum atau tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap rasa aman masyarakat.
- (b) Masyarakat Jawa Barat yang sebenarnya rawan konflik massal terutama di Pantai Utara mendapat perhatian khusus Polda Jabar untuk dieliminir melalui penggelaran Polri di tempat-tempat rawan, penempatan Polwan di lini depan, menarik simpati masyarakat dengan pelayanan yang baik, menekan seminimal mungkin biaya SIM dan meningkatkan pola kemitraan dengan lapisan-lapisan masyarakat tertentu untuk bersama-sama memecahkan masalah Kamtibmas.
- (c) Peningkatan angka kejahatan tidak berpengaruh terhadap rasa aman masyarakat, karena setiap terjadi

gebrakan yang dilakukan aparat Polri senantiasa dibantu oleh setiap warga masyarakat terutama terhadap masalah Narkoba. Masalah yang timbul justru terjadinya dilema jumlah tahanan dikaitkan dengan plafon perawatan tahanan yang terbatas.

- (d) Kendala yang perlu diperhitungkan di wilayah Jawa Barat adalah "arogansi anggota TNI" yang harus mendapatkan penanganan secara khusus atau pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih luas di masyarakat.
- (e) Fenomena-fenomena lokal yang dapat dijadikan indikator bahwa besarnya angka kriminalitas tidak berpengaruh pada rasa aman masyarakat antara lain sebagai berikut :
 - (1) Tempat-tempat hiburan dan pariwisata tetap ramai dikunjungi wisatawan.
 - (2) Walaupun sering terjadi unjuk rasa namun hal tersebut dipandang sebagai suatu yang biasa terjadi sehingga tidak mengakibatkan perasaan ketakutan atau kepanikan
 - (3) Pembangunan dan perilaku bisnis tetap berjalan lancar.

Faktor dominan penyebab rasa aman masyarakat Polda Jabar.

- (a) Dari skor masing-masing variabel penyebab rasa aman masyarakat, ternyata skor rasa aman mencapai nilai baik (3,12), Community Policing juga baik (3,12) dan kehidupan beragama baik (3,46) maka skor yang

berimbang dan tergolong tersebut menunjukkan adanya keinginan dan kemampuan bersama yang tinggi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini tidak terlihat faktor yang paling dominan. Walaupun demikian Community Policing harus menjadi penggerak utama tercapainya rasa aman di Jawa Barat, karena dari hasil pengamatan dan wawancara Community Policing telah membuktikan keberhasilannya dalam menumbuhkan rasa aman masyarakat.

(b) Keadaan butir 1) antara lain dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

(1) Kebijaksanaan Kapolda Jabar untuk menggelar kekuatan seoptimal mungkin terutama pada pukul 06.00 s/d 09.00 dimana seluruh anggota baik opsnel maupun pembinaan turun ke lapangan, sedangkan masalah administrasi cukup ditangani oleh PNS.

(2) Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di laksanakan dengan metode "Lintas Fungsi Operasional" yang pengendaliannya diserahkan kepada seluruh fungsi operasional secara bergantian. Pendelegasian wewenang mengambil keputusan sampai pada tingkat *diskresi* telah diupayakan secara konsisten, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar terhadap tercapainya tujuan tugas, terutama dimulai para perwiranya.

(3) Semaksimal mungkin memaksi-

malkan Babinkamtibmas dengan mengisi sekurang-kurangnya satu Babinkamtibmas untuk 2 - 3 desa.

(4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk penegakan hukum secara sehat, manusiawi, proporsional dan profesional.

(5) Penggerakan anggota dengan penerapan manajemen kalbu, penempatan Polwan di lini depan dan penggunaan atribut yang mudah dikenal masyarakat (rompi polisi)

(6) Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan forum silaturahmi Kamtibmas (FSK) untuk memecahkan persoalan-persoalan Kamtibmas.

(7) Membangun public adress dan menyediakan public complain melalui media cetak maupun acara *coffee morning* dalam rangka menghimpun umpan balik serta menarik simpati masyarakat, antara lain dengan pendekatan meringankan biaya administrasi SIM dan percepatan pelayanan.

(8) Mengefektifkan jaringan yang tertata.

(9) Adanya dukungan dari instansi samping seperti biaya visum et repertum dan otopsi serta dukungan melalui APBD.

Keadaan Polda Riau

a. Pengukuran Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Tingkat rasa aman masyarakat Riau

diukur dengan menghitung skor seperti tertera pada tabel berikut

No.	LOKASI	Mean
1	Poltabes Pekanbaru	3,241
2	Polres Kampar	2,881
3	Polres Tg. Balai Karimun	2,822
4	Poltabes Bareleng Batam	2,485
5	Polres Tanjung Pinang	3,185
Skor		2,923

Skor 2,923 menggambarkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat belum mencapai kriteria *baik*, karena masih dibawah standar minimal (3).

b. Pengukuran Keberhasilan Community Policing

Pengukuran keberhasilan community policing juga menggunakan teknik scoring seperti tercantum dalam tiga tabel di bawah ini

1) Keberhasilan CP Aspek tujuan / Puan Masyarakat

No.	LOKASI	Mean
1	Poltabes Pekanbaru	3,449
2	Polres Kampar	3,015
3	Polres Tg. Balai Karimun	3,208
4	Poltabes Bareleng Batam	3,419
5	Polres Tanjung Pinang	3,266
Skor		

2) Keberhasilan CP Aspek Petugas

No.	LOKASI	Mean
1	Poltabes Pekanbaru	2,365
2	Polres Kampar	2,744
3	Polres Tg. Balai Karimun	2,746
4	Poltabes Bareleng Batam	2,620
5	Polres Tanjung Pinang	2,697
Skor		2,634

3) Keberhasilan CP dari Aspek Agama

No.	LOKASI	Mean
1	Poltabes Pekanbaru	3,074
2	Polres Kampar	3,167
3	Polres Tg. Balai Karimun	2,845
4	Poltabes Bareleng Batam	3,030
5	Polres Tanjung Pinang	3,093
Skor		3,042

4) Rekapitulasi Skor

Sub Variabel	Skor
B 1	3,266
B2	2,634
B3	3,042
Mean Skor	2,981

Meanskor sebesar 2,981 menunjukan bahwa pelaksanaan *Community Policing* di Polda Riau oleh anggota operasional pada lini terdepan dan para Babinkamtibmas belum mencapai kriteria cukup baik. Hasil ini sebenarnya dapat mencapai variabel baik (nilai 3) karena kondisi di wilayah Polda Riau didukung oleh aspek agama dan kemampuan masyarakat sendiri.

c. *Pengukuran Kehidupan Agama*

Tingkat kehidupan beragama /adat di Riau juga perlu diukur dengan menggunakan teknik scoring sebagai berikut :

No.	LOKASI	Mean
1	Poltabes Pekanbaru	3,329
2	Polres Kampar	3,473
3	Polres Tg. Balai Karimun	3,336
4	Poltabes Bareleng Batam	3,409
5	Polres Tanjung Pinang	3,347
Skor		3,379

Total Skor **3,379** pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama masyarakat di Polda Riau termasuk kategori Baik. Nilai ini belum merupakan jaminan bahwa kehidupan beragama sesuai dengan kenyataan yang ada, karena secara umum setiap anggota masyarakat akan mengemukakan jawaban yang baik saja.

Hubungan antara variabel "rasa Aman Masyarakat" dengan "Police Population Ratio (PPR)"

Apabila dikaitkan dengan data-data PPR selama 6 tahun, maka jelas terlihat bahwa kenaikan atau penurunan jumlah perbandingan polisi dan masyarakat tidak serta merta menaikkan atau menurunkan Crime Total

TAHUN	PPR	C.T
1997	1:929	3.580
1998	1:873	4.318
1999	1:841	4.832
2000	1:803	4.644
2001	1:755	4.394
2002	1:725	3.035

Pengaruh PPR terhadap angka kejahatan dan rasa aman masyarakat.

Apabila memperhatikan tabel hasil tabel data PPR dan Crime Total di atas, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara PPR dengan angka kriminalitas sebagai salah satu indikator rasa aman masyarakat. Hal ini dianalisis dari trend perkembangan antara PPR dengan Crime Total selama 6 tahun. Seharusnya setiap ada kenaikan jumlah anggota Polri atau kenaikan PPR, akan diikuti dengan penurunan crime total, tetapi pada kenyataannya setiap penambahan anggota Polri (PPR) tidak selalu berakibat penurunan angka kejahatan. Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kenaikan jumlah Polri tahun 1997 s/d 2002 ternyata tidak selalu menurunkan jumlah kejahatan (CT) pada tahun yang sama.

Masyarakat Riau yang sebenarnya rawan konflik antar etnis terutama di Pulau Batam mendapat perhatian khusus Polda Riau untuk dieliminir melalui penggelaran Polri di tempat-tempat rawan, penempatan Polwan di lini depan, menarik simpati masyarakat dengan pelayanan yang baik, menekan seminimal mungkin biaya SIM dan meningkatkan pola kemitraan dengan lapisan-lapisan masyarakat tertentu untuk bersama-sama memecahkan masalah Kamtibmas.

Kendala yang perlu diperhitungkan di wilayah Polda Riau adalah "Keberadaan Putra Daerah" yang menuntut untuk diperlakukan secara khusus (otonomi) berkaitan dengan pemisahan Kepri menjadi propinsi tersendiri (Marwah) harus mendapatkan penanganan secara khusus

atau pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih luas di masyarakat.

Fenomena-fenomena lokal yang dapat dijadikan indikator bahwa besarnya angka kriminalitas tidak berpengaruh pada rasa aman masyarakat antara lain sebagai berikut :

- Tempat-tempat hiburan dan pariwisata tetap ramai dikunjungi wisatawan.
- Walaupun sering terjadi unjuk rasa namun hal tersebut dipandang sebagai suatu yang biasa terjadi sehingga tidak mengakibatkan perasaan ketakutan atau kepanikan
- Pembangunan dan perilaku bisnis tetap berjalan lancar.

Pengaruh dominan terhadap kurang tingginya rasa aman masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai kendala yang mengakibatkan belum terlaksananya community policing yang baik, adapun faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan community policing antara lain :

- a) Sikap resistens masyarakat setempat terhadap para pejabat (Polri) yang berasal dari luar daerah sangat tinggi, terutama pasca orde baru dan dimulainya era otonomi daerah. Sikap "Contraventive" semacam ini jelas sangat menghambat tumbuhnya rasa ikut memiliki dan berpartisipasi di bidang tugas kepolisian.
- b) Luas daerah hukum Polda Riau yang hampir sepanjang Pulau Sumatera di tambah keadaan geografi yang terdiri dari banyak pulau serta keterbatasan

alat komunikasi dan transportasi akan sangat menambah berat beban tugas dalam rangka Community Policing.

- c) Adanya proyek Vital yang meliputi kawasan yang sangat luas (seperti Caltex, dsb) menyedot banyak tenaga dan belum dapat diatasi dengan berbagai program Community Policing (seperti 911, Diklat Satpam, dsb) karena sifat masyarakat lokal yang tuntutananya terlalu banyak dan malas dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sendiri.
- d) Beban tugas yang cukup berat (terutama dalam kaitan geografi dan proyek vital) menyebabkan pelaksanaan community policing kurang optimal karena Babinkamtibmas masih dibebani tugas-tugas di pen jagaan Polsek dan belum berbaur dengan masyarakat, sedangkan satuan-satuan Brimob tidak berfungsi optimal. Untuk Community Policing dan satuan pemukul reaksi cepat karena tidak diperhatikannya kesejahteraan/pemasuakannya yang masih sangat memprihatinkan.
- e) Konflik kepentingan yang berkepanjangan belum ada tanda-tanda jalan keluarnya (seperti konflik kepentingan antara badan otorita dan Pemko di Batam, antara masyarakat Riau daratan dan Riau kepulauan, atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dsb) telah menyebabkan terbelengkelainya permasalahan-permasalahan yang terus muncul dan pasti berkembang menjadi konflik sosial yang meluas seperti rumah liar

Total Skor 3,206 pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama masyarakat di Polda Sumut termasuk kategori Baik. Nilai ini belum merupakan jaminan bahwa kehidupan beragama sesuai dengan kenyataan yang ada, karena secara umum setiap anggota masyarakat akan mengemukakan jawaban yang baik saja.

Hubungan antara variabel "rasa Aman Masyarakat" dengan "Police Population Ratio (PPR)"

Apabila dikaitkan dengan data-data PPR dan CT selama 7 tahun, maka jelas terlihat bahwa walaupun PPR meningkat namun angka total kriminalitas (CT) juga menunjukkan peningkatan, dengan demikian penambahan jumlah personil Polri dalam rangka memenuhi PPR tidak serta merta mempengaruhi turun atau naiknya crime total. Namun kenaikan Crime Total juga berpengaruh pada tingkat rasa aman masyarakat yaitu hanya mencapai skor 2,899 (belum mencapai kategori cukup baik).

DATA Police Population Ratio (PPR) dan Crime Total (CT)

TAHUN	PPR	CT	C.CL
1995	1:1162	10.145	5.743
1996	1:1107	11.394	6.904
1997	1:1057	12.437	7.120
1998	1:1011	13.526	7.030
1999	1:970	15.930	8.110
2000	1:931	16.061	8.466
2001	1:896	16.530	9.095

Pengaruh PPR terhadap angka kejahatan

Dari tabel data yang dituangkan di bawah ini, terlihat bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara PPR dengan angka kriminalitas. Hal ini dapat dianalisis dari trend perkembangan antara PPR dengan Crime Total selama 7 tahun. Seharusnya setiap kenaikan jumlah anggota Polri atau kenaikan PPR akan diikuti penurunan crime total, tetapi pada kenyataan, kenaikan jumlah Polri (PPR) tidak selalu berakibat penurunan angka kejahatan. Dari tabel dibawah ini terlihat jelas bahwa kenaikan jumlah Polri tahun 1997 s/d 2001 tidak menunjukkan penurunan jumlah kejahatan (CT) pada tahun yang sama.

Correlation value sebesar $-0,988$ menunjukkan bahwa tidak ada korelasi (hubungan) antara PPR dan rasa aman masyarakat yang berarti hipotesa 1. terbukti bahwa "penambahan jumlah anggota Polri tidak serta merta menumbuhkan rasa aman di masyarakat"

Tingginya angka kejahatan di wilayah hukum Polda Sumut juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan arus reformasi serta ciri-ciri masyarakat modern yang mempunyai kecenderungan sebagai berikut :

- Semakin banyaknya dan beragam kepentingan masyarakat
- Semakin mendahulukan kepentingan individu masing-masing.
- Hubungan lebih banyak bersifat rasional di banding dengan emosional.
- Sistem kekerabatan sudah tidak lagi bersifat paguyuban.

Walaupun demikian, di beberapa daerah di Sumatra Utara, masyarakat masih memiliki sistim kekerabatan paguyuban yang cukup baik, karena keterikatannya terhadap hukum adat dan sistem kekeluargaan (marga) yang ada.

Pengaruh angka kejahatan terhadap rasa aman masyarakat.

Walaupun dari tabel PPR dari Crime Total dari tahun ke tahun berikutnya terlihat adanya peningkatan kuantitas personil Polri, namun angka kriminalitas tetap tinggi. Hal ini tidak berarti bahwa rasa aman masyarakat mulai terganggu namun masyarakat Polda Sumut memiliki karakteristik tersendiri. Mereka secara umum sadar, bahwa kejahatan harus di lawan, karena kejahatan akan membawa penderitaan pada warga masyarakat lainnya. Tingginya angka kriminalitas diakibatkan oleh aktifitas Polri dan kesadaran warga mengungkap peristiwa kejahatan atau pada saat-saat para preman tidak mendapatkan lapangan kerja yang layak, mereka berbuat kejahatan karena kebutuhan ekonomi. Keadaan inilah yang menimbulkan angka kriminalitas menjadi tinggi.

Faktor dominan penyebab tingkat rasa aman masyarakat.

a) Apabila melihat nilai masing-masing variabel yang mempengaruhi rasa aman masyarakat, yaitu Crime Total, Community Policing (2,81) dan kehidupan beragama (3,21). Terlihat dari data ini bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab kurang

konduktivitas rasa aman masyarakat Sumut adalah belum efektifnya community policing. Beberapa kendala yang menghadang pelaksanaan community policing dapat dikemukakan antara lain :

(1) Konflik kepentingan masyarakat terhadap kekerasan, judi yang selalu menjadi dilema. Bila dilarang, maka kriminalitas merebak dan apabila dibiarkan maka terjadi reaksi yang cukup tajam. Hal ini sangat mempengaruhi di dalam memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

(2) Adanya adat "Boru/Hula-hula" yang sangat berpengaruh di dalam perilaku masyarakat batak. Manakala Hula-hula berperilaku baik maka dapat diharapkan perilaku yang baik bagi Boru, namun sebaliknya bila Hula-hula berperilaku jahat maka kejahatan pula yang cenderung dilakukan Boru. Lebih menguatirkan lagi bila ikatan adat semacam ini sudah merambah kedalam pola interaksi antara Polri dan Masyarakatnya. Hal ini didukung dengan pembuktian statistikal sebagai berikut :

b) Upaya meningkatkan Community Policing di jajaran Polda Sumut antara lain :

(1) Kebijakan Kapolda Sumut yang di jabarkan oleh pelaksana di lapangan yang intinya memberikan perhatian dan kesadaran serta merangkul masyarakat secara

persuasif, namun menindak dengan tegas setiap pelanggaran yang dapat berdampak luas terhadap penderitaan masyarakat (Polisi sahabat Rakyat, Pola kemitraan, dll).

(2) Penggelaran personil Polri, sehingga tidak terkesan adanya anggota yang menganggur pada saat masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi.

(3) Dukungan moral maupun materiil dari institusi terkait terutama pemerintah daerah. Dinas pendidikan dan pengajaran, dalam penyelamatan generasi penerus khususnya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

(4) Perilaku kehidupan masyarakat dengan motto "hidup tenteram, saling berdampingan" walaupun berbeda etnis dan agama. (nilai variabel kehidupan agama 3,21 atau kategori baik).

(5) Peran lembaga adat cukup dominan dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, walaupun demikian tidak mengurangi wibawa hukum positif. (Puru-puru Saga dan Merga Silima Tuter Siwalu Ruhut Sitelu).

(6) Rekayasa jajaran Kepolisian Polda Sumut, seperti dialog interaktif di media elektronik, program polisi peduli rakyat miskin dengan pasar murah, membangun lokalsekolah, penyadaran religius dengan membangun rumah ibadah, menarik para tokoh agama sebagai ulama

mitra kamtibmas dan pengembangan seni musik.

Kadaan umum

a. Tingkat rasa aman masyarakat

No.	LOKASI	Mean
1.	Polda Bali	3,193
2.	Polda Metro	3,164
3.	Polda Jabar	3,120
4.	Polda Riau	2,923
5.	Polda Sumut	2,890
skor		3,058

Skor ini menggambarkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat di masing-masing Polda berbeda.

b. Keberhasilan Community policing

No.	LOKASI	Mean
1.	Polda Bali	3,087
2.	Polda Metro	3,148
3.	Polda Jabar	3,125
4.	Polda Riau	2,981
5.	Polda Sumut	2,801
skor		3.028

Total skor ini menunjukkan bahwa CP di masing-masing Polda telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh anggota pada lini terdepan dan para Babinkamtibmas.

c. Tingkat kehidupan agama

No.	LOKASI	Mean
1.	Polda Bali	3,386
2.	Polda Metro	2,955
3.	Polda Jabar	3,542
4.	Polda Riau	3,379
5.	Polda Sumut	3,206
skor		3,284

Skor 3,284 pada variabel ini memberikan indikasi bahwa kehidupan beragama masyarakat di atas sudah sangat mantap dan sangat baik karena angkanya di atas skor 3 (standar minimal), tingkat kehidupan agama yang demikian memiliki derajat kemungkinan tertinggi sebagai penyebab tingginya rasa aman masyarakat.

Kesimpulan

- a. Tidak ada hubungan yang signifikan antara Police Population Ratio (PPR) dengan rasa aman masyarakat, karena peningkatan jumlah Anggota Polri tidak serta merta dapat menurunkan jumlah kejahatan dan meningkatkan angka penyelesaian perkara.
- b. Faktor dominan yang menyebabkan rasa aman masyarakat adalah intensifnya penghayatan kehidupan beragama dan tumbuhnya solidaritas sosial serta ikatan emosional adat setempat, disamping upaya Community Policing yang mampu menyentuh aspek kultural religius masyarakat lokal (seperti pemberdayaan pecalang/Banjar, pranata "Awig-awig" di Bali, pranata adat "Puru-puru Saga Marga Silima Tuter siwalu-ruhut sitepu" di Sumut, pranata adat "cara sadesa ciri sabumi" di Jabar dan sebagainya).
- c. Jumlah kebutuhan riil anggota Polri di daerah / Polda kurang tepat menggunakan pertimbangan rasio polisi dengan jumlah penduduk, tetapi akan lebih akurat menggunakan dasar "beban tugas" yang dihitung dari jumlah AF, PH dan FKK serta mengacu

kepada faktor geografi dan kegiatan masyarakat (kalender Kamtibmas).

- d. Kebutuhan anggota Polri berdasarkan beban tugas di tiap-tiap Polda jumlahnya bervariasi, karena mereka memiliki luas daerah, faktor karakteristik dan kerawanan daerah yang berbeda satu sama lainnya.
- e. Dukungan dan bantuan masyarakat maupun Pemda didalam tugas Kepolisian mulai meningkat meskipun belum seluruhnya dianggarkan dan disalurkan didalam RAPBD.

REKOMENDASI

- a. Target rasio Polri dan penduduk sebesar 1 : 500 seperti dicanangkan Pimpinan Polri hanya berlaku secara nasional, sedangkan jumlah kebutuhan riil anggota Polri di satuan-satuan kewilayahan dan fungsi perlu di hitung kembali berdasarkan beban tugas yang mengacu pada kriteria yang akan disusun oleh suatu Pokja.
- b. Perlu diterbitkan Surat Perintah Kapolri tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyusun kriteria / parameter untuk menghitung kebutuhan riil personil pada satuan kewilayahan dan fungsi Polri berdasarkan perhitungan "beban tugas".
- c. Desumdaman Kapolri menampung semua kebutuhan riil personil Polri dari satuan kewilayahan dan fungsi untuk dijadikan target atau pedoman di dalam pemenuhan kebutuhan personil Polri.